



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SAMAN K.
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
3. NHK : 189705

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	770.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 880 m2/204 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	163.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2008, WARISAN Rp. 3.000.000		
2. LAINNYA, FEDERAL SEPEDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 500.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5L,IL4,16V,DOHC,VVT-i Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	733.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.669.250.000
III. HUTANG	Rp.	128.882.488
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.540.367.512

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REZA FACHRIZAL
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
3. NHK : 490050

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.155.043.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 513 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 699.657.000
4. Tanah Seluas 5843 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 39.136.500
5. Tanah Seluas 20160 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 120.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 125.750.000

1. MOBIL, DAIHATSU/TERIOS 1.5 RA/T MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.875.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 22.376.675

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.316.045.175

III. HUTANG

Rp. 224.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.091.545.175



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD JUNAIDI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**
3. NHK : **819069**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 724 m²/98 m² di KAB / KOTA BATANG HARI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/45 m² di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 436 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
4. Tanah Seluas 800000 m² di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 135.000.000

1. MOBIL, TOYOTA B401RA-GMZFJ(CALYA1.2GM/T) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N13L2A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.280.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.280.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAT SANUSI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS**
3. NHK : **721775**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/232 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/100 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **162.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM.SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **162.189.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **31.253.862**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.255.942.862**

III. HUTANG Rp. **347.922.618**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **908.020.244**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.